**EKSISTENSI KOMUNIKASI TERHADAP UPAYA PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI PASCA BENCANA DI KABUPATEN LUWU UTARA**

**MUH. TAUFIK RAHMANSYAH 1, HAFIED CANGARA 2, ARIANTO 3**

Universitas Hasanuddin, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik123

[taufikabdullah918@gmail.com1](mailto:taufikr132@gmail.com1), [cangara\_hafied@yahoo.com2](mailto:cangara_hafied@yahoo.com2), [arianto.92komunikasi@gmail.com3](mailto:arianto.92komunikasi@gmail.com3)

***Abstract:***

*Communication has always been a medium for every human being to coordinate or interact socially, whether in the face of a disaster or not. It becomes normal when communication is needed in post-disaster recovery efforts. Although communication is not able to completely change the overall socio-economic aspects, it is not surprising that communication cannot be separated in every disaster management. Because, communication can present an organized handling system. The purpose of this research is to examine the extent to which communication plays its role and function in rehabilitation (recovery) efforts after the extraordinary fury of banjir bandang natural disasters. Where the incidence of natural disasters that hit North Luwu Regency caused a lot of losses, especially from the socio-economic aspects (education, housing, health, religious activities, facilities and infrastructure, trade, umkm, and also agriculture). This is because many people have experienced a downturn, even parts of Masamba and Baebunta sub-districts also feel the impact. In this research the researcher applied a descriptive qualitative research method using a case study approach. Where in determining the data source, the writer uses purposive sampling. The results of this study are that in this recovery effort there is a joint responsibility (North Luwu Regency government).*

***Keywords:*** *Communication, Recovery Socio-Economi, North Luwu Regency.*

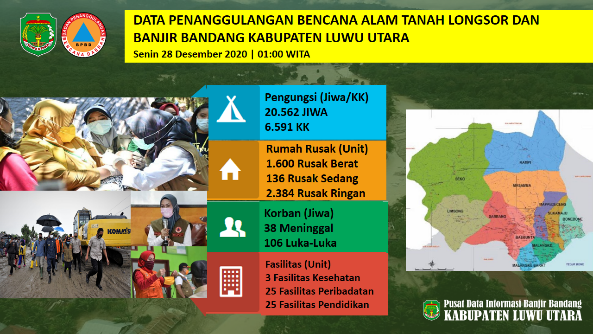
**PENDAHULUAN**

Senin, 13 Juli 2020, Kabupaten Luwu Utara dikejutkan dengan terjadinya peristiwa bencana alam banjir bandang, yang mengakibatkan sebagian wilayah kecamatannya ikut merasakan dampaknya (Kecamatan Malangke, Kecamatan Sabbang, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Baebunta Selatan, Kecamatan Baebunta, dan Kecamatan Masamba). Bencana alam tersebut termasuk salah satu peristiwa alam yang sangat luar biasa mengerikan, sebab sosial ekonomi masyarakat menjadi tumbalnya.

Menanggapi hal tersebut diperlukan berbagai bentuk pendekatan-pendekatan yang kiranya dapat meminimasir dampak yang ditimbulkan, tidak sekedar pendekatan ekonomi, politik, melainkan dapat melalui pendekatan multidisiplin ilmu seperti halnya komunikasi dan agama. Dalam Al.-Qur’an juga telah dijelaskan mengenai suatu bencana yang dialami setiap wilayah, yang berarti hal tersebut merupakan ujian yang diberikan Allah Swt terhadap hambanya. Seperti yang ada dalam Al-Qur’an, Allah Swt menegaskan bahwa:

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”. (QS. Al-Baqarah:155) (Kementerian, 2006)

**Gambar 1 Total Kerusakan akibat Bencana**

****

Sumber Pusat Data Informasi Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara

<https://banjirbandang.luwuutarakab.go.id/>

Berdasarkan gambar 1 di atas, peristiwa alam banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara sangat menimbulkan banyak kerusakan baik itu materil dan non materil yang mestinya perlu dilakukan rehabilitasi (pemulihan) secara bertahap, seperti halnya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ruang publik, fasilitas pelayanan, fasilitas perdagangan, sektor pertanian, perkebunan, dan juga umkm dengan harapan dapat mengembalikkan hasil pendapatan daerah akibat bencana alam, yang secara keseluruhan total kerugian yang dialami yakni Rp. 7-8 Triliyun (bnpb.go.id, 2020).

Melihat begitu besar total kerugian yang dialami, maka hal yang harus diperbuat yakni sistem manajemen pengelolaan pasca bencana yang harus terorganisir secara terstruktur. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Asy’ari, 2018) mengatakan bahwa, bencana sekecil dan sebesar apapun itu tentu menimbulkan kerugian, yang bilamana sudah menjadi kewajiban untuk melakukan rehabilitasi sedini mungkin, sehingga tidak menambah kerugian-kerugian lainnya. Dimana pada proses pemulihan dibutuhkan peran serta seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah Kabupaten Luwu Utara, sebab peristiwa alam banjir bandang tersebut termasuk kategori peristiwa alam terganas yang dialami Kabupaten Luwu Utara di tahun 2020.

Kita pahami bahwa banjir Bandang merupakan kejadian terendamnya sebuah wilayah ataupun daratan yang dipengaruhi oleh tingginya volume air. Banjir bandang dapat terjadi disebabkan kurangnya tingkat kepatuhan manusia dalam bermukim dengan tidak menempati ataupun menjauhi area tinggal disekitar bantaran sungai (Rijanta, R; Hizbaron, D.R; Baiquni, 2018). Selama ini penanganan bencana dapat diarti luaskan sebagai aktivitas sosial kemanusiaan yang dilakukan secara masif, sebab berlandaskan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 perihal penanggulangan bencana, menjelaskan bahwa peristiwa bencana alam merupakan sebuah kejadian yang disebabkan oleh fenomena alam dan non alam yang ketika terjadi mampu memberikan ancaman terhadap tata kelola kehidupan manusia yang pada akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa, merusak lingkungan, total kerugian cukup besar, dan berdampak pada psikologis manusia. Sehingga dalam UU tersebut tentu terdapat suatu hak dan kewajiban yang harus dilindungi oleh pemerintah setempat berkaitan dengan asupan kehidupan sosial ekonominya. Oleh sebab itu, setiap *stakeholder* tentunya memiliki kapabilitas ataupun sumber daya manusia lebih, terkait kemampuan dalam menangani bencana (Budi, 2011). Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, maka peran pemerintah begitu sangat dibutuhkan. Bukan hanya dalam tindakan tetapi juga dalam hal berkomunikasi.

Seperti yang dikatakan oleh Hubermas dalam buku (Parsons, 2006), mengatakan bahwa usaha untuk dapat memaksimalkan kepentingan publik ialahh dengan memahami kekuatan pasar. Dalam artian berfungsinya suatu kebebasan (*freedom*) ataupun kebebasan individu ketika memutuskan pilihan dapat meningkatkan ketersediaan barang publik dan juga kesejahteraan publik Adapun penilitian yang dilakukan (Johnson, 2007), dimana kredibilitas seseorang dapat dilihat dari sejauhmana kelayakan informasi yang disebarluaskan bahkan dalam tataran efisiensi ketika pencarian informasi..Dalam Al-Qur’an Allah pun telah menegaskan bahwa:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Qs. Al-Muddassir : 38) (Kementerian, 2006)

Manusia termasuk seorang aktor kreatif dari realitas sosialnya, manusia secara aktif mengembangkan dirinya melalui stimulus dari dalam dunia kognitifnya (Bungin, 2014). Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kondisi penanganan pasca bencana pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan entitas lainnya (Skpd, Bpbd, Camat) yang sangat peduli terhadap wilayah dan masyarakatnya, tidak serta merta menjadikan aturan sebagai acuan ketika menangani bencana. Terlebih lagi terdapat tantangan internal ketika ingin menyamakan persepsi manusia satu dengan manusia lainnya . Tetapi, hal tersebut dapat terlaksana secara baik, jika seluruh pihak dapat menciptakan nuans komunikasi kohesif, sehingga yang awalnya kurang meyakini, namun mampu menghadirkan tingkat pemahaman secara simultan.

Sebab, dalam upaya penaganan bencana (pemulihan sosial ekonomi) dibutuhkan kepercayaan dan kerjasama tim yang terkoordinir secara baik. Penanganan bencana tanpa adanya koordinasi mungkin saja menimbulkan kesulitan dalam proses penanganannya. Sehingga hal tersebut memerlukan formulasi-formulasi yang terukur. Maka dibutuhkan sebuah strategi dalam menjalankan upaya pemulihan, strategi-strategi tersebut bisa melalui perspektif komunikasi. Dimana koordinasi, informasi dan manajemen bisa terkordinir secara baik, bagaimana pemilihan dan penggunaan media, bahkan bagaimana mengukur penyebaran pesan dari satu Skpd ke Skpd lainnya, dari satu lembaga ke lembaga lain, dan dari bupati bisa langsung tersampaikan kepada masyarakat. Terlebih lagi upaya pemulihan mesti harus dibarengi dengan komunikasi.

Maka untuk menciptakan sebuah sistem pemulihan yang terkoordinir diperlukan sebuah mekanisme pemulihan yang dilakukan secara bertahap seperti perencanaan, koordinasi, aktualisasi, dan evaluasi, yang secara keseluruhannya merupakan salah satu unsur terpenting yang dihasilkan oleh komunikasi. Sehingga dari beberapa unsur tersebut dapat menciptakan suatu upaya pemulihan sosial ekonomi pasca bencana banjir bandang. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Muktaf, 2017) yang menjelaskan bahwa meskipun komunikasi tidak mampu sepenuhnya merubah kondisi sosial ekonomi masyarakat secara langsung, tetapi komunikasi dapat dijadikan sebagai media ketika dalam penanganan sebelum dan pasca bencana. Mengetahui jika koordinasi yang baik lahir berkat adanya sistem komunikasi yang terukur. Didalam komunikasi juga terdapat begitu banyak unsur-unsur yang dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dalam menjalankan berbagai upaya termasuk upaya pemulihan sosial ekonomi Kabupaten Luwu Utara. Dimana kerjasama yang baik muncul karena ada komunikasi, koordinasi yang handal muncul karena ada komunikasi, dan penyebaran pesan yang baik pun karena pengaruh media komunikasi.

Eksistensi komunikasi masih sangat diperhitungkan, sebab komunikasi dapat menghadirkan suasana yang harmonis dalam ruang lingkup kerja berkontekskan sinergitas antar dinas, lembaga Bpbd, lembaga swasta dan seluruh elemen masyarakat. Ketersediaan komunikasi dalam ruang lingkup pemulihan pasca bencana, tentu menjadi suatu kebutuhan, karena selama ini komunikasi hanya terdapat pada kondisi tanggap darurat, tetapi disisi lain setiap penanganan bencana seperti proses mitigasi bencana, tanggap darurat, penyebaran informasi, serta pemulihan pasca bencana terdapat komunikasi. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika komunikasi dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam menjalankan upaya pemulihan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menulis perihal bagaimana eksistensi komunikasi dalam upaya pemulihan sosial ekonomi pasca bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara?

**METODE PENELITIAN**

Penggunaan metode pada sebuah penelitian merupakan suatu keharusan. Dimana pada penelitian ini penulis menggunakan kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian sosial yang tidak ada kaitannya dengan angka ataupun rumus, yang lebih kepada menganalisis kondisi disuatu wilayah tertentu dengan keterbatasan-keterbatasan yang terjadi pada kehidupan nyata baik secara *personal*, berkelompok kecil ataupun besar bahkan bernegara sekalipun (Yin, 2012). Penulis bertindak selaku instrumen utama, yang lebih banyak terlibat langsung pada lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk lebih memperkuat data penelitian (Creswell, 2014). Kabupaten Luwu Utara tentu memiliki luas wilayah yang cukup luas sehingga penulis menggunakan teknik analisis data *purposive sampling* (Sugiyono, 2006)*,* dimana peneliti tentu mengumpulkan berbagai data dari informan utama ataupun pendukung, informasi melalui berbagai media yang dilakukan baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, selanjutnya dilakukan reduksi data yang sesuai dengan masalah penelitian yang nantinya diklasifikasi dan penarikan kesimpulan sebagai tahap akhir dari pada teknik *purposive sampling.*

**Gambar 3 Model Analisis Miles and Huberman**

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penyajian Data

Penarikan Kesimpulan

Sumber : Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Sugiyono, 2006)

Dalam penelitian ini terdapat sumber data primer yang merupakan pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam terkait tema, selain itu terdapat pula data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang dianggap penting.

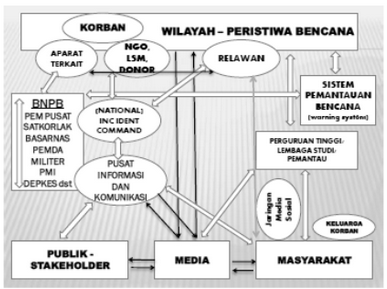
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Eksistensi Komunikasi dalam Pemulihan Pasca Bencana di Kabupaten Luwu Utara**

Besarnya dampak yang disebabkan oleh peristiwa alam banjir bandang membuat dua Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara mengalami keterpurukan secara signifikan. Membutuhkan koordinasi secara sistematis sehingga dapat mencitapkan kesigapan, kecekapan, bahkan keakuratan dalam bertindak. Dimana setiap hari kita sering mendengar kebobrokan yang dibuat pemerintah. Tidak dapat dipungkiri sistem dan ego selama ini yang menyebabkan kebobrokan tersebut terjadi. Walaupun kebobrokan dapat diminimasir dengan saling berkoordinasi satu sama lain, pemilihan media secara kolektif, dan sejauhmana penyebaran pesan dapat tersampaikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi dapat dikatakan sebagai titik awal untuk membangun suatu koordinasi dalam sebuah kelembagaan, baik itu secara vertikal ataupun horizontal. Setiap unsur-unsur komunikasi tentu memiliki fungsi tersendiri, baik itu komunikator, pesan, media, hingga kepada komunikan. Abad ke-21 merupakan abad yang dipenuhi oleh hias-hias teknologi informasi, jadi dapat dikatakan bahwa ketersedian komunikasi akan terus berkembang dan tentunya sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia dalam beraktivitas. Seperti yang terdapat pada buku pengantar Ilmu Komunikasi (Cangara, 2016), mengatakan bahwa dalam menjelaskan komunikasi terdapat banyak bidang yang saling berkaitan dengan ilmu komunikasi seperti ilmu *science* ataupun ilmu sosial lainnya. Seperti halnya pada ruang lingkup kebencanaan terdapat pula bidang ilmu komunikasi bencana, yang termasuk baru. Meskipun terbilang baru tetapi komunikasi bencana dapat berperan penting pada setiap penanganan bencana, yang dimana dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam bertindak ataupun memberi keputusan.

Pada setiap penanganan bencana, komunikasi selalu memainkan peran dan fungsinya selama, sesaat bahkan pasca bencana terjadi yang merupakan komponen tanggap darurat hingga upaya pemulihan. Sehingga sampai saat ini eksistensi komunikasi masih diperhitungkan, bukan hanya pada bidang ilmu penyiaran tetapi juga ilmu kebencanaan yang penuh dengan kebijaka-kebijakan. Kita ketahui bahwa bencana dapat bedakan kedalam tiga jenis, diantaranya: Bencana Alam, yang merupakan kejadian alam yang tidak tersentuh campur tangan dari manusia (tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, kekeringan, angin topan gunung meletus, dan tanah longsor). Bencana non alam, ialah rangkaian kejadian non alam, diakibatkan oleh adanya campur tangan manusia yang dihasilkan dari sebuah laboraturium (wabah penyakit, epidemi, bahkan kegagalan teknologi). Kategori terakhir yaitu bencana Sosial, yaitu kejadian yang dapat berupa kontak fisik antar sesama manusia meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas, bahkan terorisme. Dalam kondisi penanganan bencana, terdapat pula manajemen komunikasi untuk kebutuhan proses koordinasi ataupun penyebaran pesan dengan tujuan agar dalam proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dalam buku (Budi, 2011) komunikasi dalam literasi bencana, memberikan penjelasan bahwa dalam upaya pemulihan pasca bencana informasi sangat berperan penting dalam kondisi sebelum dan pasca bencana dengan maksud memaksimalkan upaya penanganan bencana. Sehingga gambar 3 di bawah ini akan menggambarkan sejauhmana proses pemetaan komunikasi dalam penangana bencana:

**Gambar 4 Pemetaan Komunikasi dalam Penanganan Bencana,**



*Sumber : Komunikasi Bencana* (Budi, 2011)

Berdasarkan gambar 3 di atas, kita lihat bahwa sejauh ini komunikasi dijadikan sebagai media dalam melakukan koordinasi di dalam ruang lingkup pemerintahan baik Bupati, Skpd, Bpbd, dan Camat. Disamping itu eksistensi komunikasi juga sangat diperhitungkan ketika dalam suatu kebijakan, karena suatu kebijakan yang dibarengi dengan komunikasi tentu akan menciptakan upaya pemulihan yang dapat terorganisir secara baik. Dalam artian sejauhmana koordinasi yang dilakukan sebelum dan setelah kebijakan itu direalisasikan. Melihat situasi yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara begitu yang sangat merugikan masyarkat, dimana tata kelola kehidupan sosial ekonomi mengalami keterpurukan, sehingga dibutuhkannya suatu penanganan ekstra untuk dapat menghasilkan kebijakan yang peduli kepada masyarakat (kepentingan publik). Fakta yang terjadi di wilayah bencana, masyarakat tentu menginginkan suatu upaya pemulihan secara merata. Maka dalam membuat suatu kebijakan, tentunya terdapat proses pendataan. Dimana data yang diperoleh tentu harus menggunakan media komunikasi untuk dapat dianalisis secara maksimal, begitupun ketika kebijakan tersebut ingin disampaikan kepada seluruh pihak tentu memerlukan komunikasi, bahkan untuk menyampaikan hasil kebijakan yang disepakati, tentunya juga menggunakan komunikasi. Jadi, tidak dapat dipungkiri jika komunikasi begitu sulit terpisahkan dari disiplin ilmu lain, terlebih lagi mengenai upaya pemulihan pasca bencana.

Disamping itu, dalam komunikasi terdapat sebuah wadah untuk menampung gagasan, ide, ataupun sikap masyarakat akan kebijakan yang akan dibuat. Wadah tersebut dapat disajikan dalam bentuk FGD (*forum Group Discussion*) dengan pihak yang terlibat penanganan bencana (Skpd, Bpbd, dan masyarakat). Pada hakikatnya upaya pemilihan merupakan ide ataupun gagasan yang mengandung anggapan bahwa terdapat suatu ruang dalam sebuah kehidupan yang bukan murni dilakukan oleh satu orang, melainkan seluruh pihak dalam hal ini secara kelembagaan, dan setipa upaya pemulihan tentu tidak terlepas dari intevensi pemerintah setempat. Dalam setiap upaya pemulihan tentu memiliki permasalahan-permasalahan berskala kecil ataupun besar sekalipun.Gambar di bawah ini akan memberikan suatu gambarang mengenai aktivitas FGD yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap upaya pemulihan pasca perstiwa bencana alam banjir bandang:

**Gambar 5 Kegiatan FGD Pemerintah Kabupaten Luwu Utara**



Dokumentasi Hasil Penelitian

Mengacu pada UU No. 32 tahun 2009 dimana Pasal 1 Ayat (1) perihal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusai serta makhluk hidup lainnya (Hukum Online.com, 2009).

Terdapat berbagai upaya pemulihan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui berbagai program-program pemulihan seperti rekonstruksi pada sektor sosial diantaranya pemberian hunian tetap kepada masyarakat yang kehilangan hunian, melakukan perbaikan pada fasilitias pendidikan, kesehatan, bahkan sarana dan prasarana lainnya. Selain itu aspek pemulihan ekonomi juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Luwu Utara yaitu normalisasi sektor-sektor perdagangan, umkm, pertanian, perkebunan demi pendapatan daerah. Adapun beberapa tahap yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Utara diantaranya:

1. Tahap Perencanaan, pada tahap ini dilakukan sebuah langkah awal untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan dalam upaya pemulihan pasca bencana. Seperti pendataan, penentuan tujuan, penentuan batas-batas kebijakan, dan penentuan tugas
2. Tahap pemilihan media, dalam tahapan ini, yang terlihat adalah sejauhmana manajemen komunikasi dapat berpengaruh terhadap upaya pemulihan.
3. Tahap aktualisasi, yang merupakan langkah untuk melakukan tindakan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap upaya pemulihan sosial ekonomi pasca bencana.
4. Tahap evaluasi, dari tahapan yang telah direalisasi, pada tahapan ini pemerintah Kabupaten Luwu Utara dapat mengetahui sejauhmana faktor pendukung – penghambat yang mempengaruhi upaya pemulihan tersebut.

Dari tahapan di atas kita dapat ketahui bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memiliki beberapa tahap agar nantinya dapat terealisasi secara maksimal. Pada upaya pemulihan sosial ekonomi pasca bencana legalitas menjadi tanggung jawab bagi pemerintah, dan pada setiap penanganannya sering terdapat aturan-aturan yang sulit ditanggap oleh akal sehat manusia, yang terkadang berbelit-belit, sehingga kaku akan bertindak maka menimbulkan keterlambatan dalam upaya penanganannya (Kusumasari, 2014). Namun, pemulihan sosial ekonomi perlu dilakukan secara hati-hati, karena hal tersebut berkaitan dengan nilai materil yang penuh dengan kewaspadaan yang tinggi. Maka upaya pemulihan harus dilakukan secara tegas, akurat, terkordinir ungkin agar secara realisasi dapat dikatakan berhasil.

Maka diperlukan peran serta komunikasi dalam berkoordinasi, karena hari ini media menjadi ciri khas tersendiri dalam berkoordinasi. Menurut Frank Dance dalam (Littlejhon, Stephen W; Foss, 2009) dalam komunikasi terdapat beberpa unsur komunikasi yang mampu diterapkan dalam membuat suatu kebijakan terkait upaaya pemulihan. Selain itu dengan menggunakan unsur-unsur komunikasi juga dapat mengontrol agenda-agenda terkait kebijakan pemulihan sosial ekonomi.

**PENUTUP/SIMPULAN**

Walaupun komunikasi tidak dapat sepenuhnya secara langsung merubah kondisi sosial ekonomi pasca bencana. Tetapi disisi lain, komunikasi mampu warna tersendiri pada setiap upaya penanganan bencana, karena dalam penanganan bencana hanya sebatas pada situasi tanggap darurat. Namun, era modernisasi abad ke-21 komunikasi tidak sekedar digunakan dalam upaya tanggap darurat, tetapi sebelum, dan pasca bencana komunikasi hadir dalam ruang mitigasi bencana, tanggap darurat dan upaya rehabilitasi pasca bencana. Uluran tangan pemerintah beserta seluruh pihak (Skpd, Bpbd, Camat) sangat diperlukan pasca bencana banjir bandang.

Dimana menangani pemulihan sosial ekonomi pasca bencana tentu sangat memerlukan sumber daya berskala besar. Terutama dalam aktualisasi tentu hal tersebut sangat berpengaruh, sehingga ketika aktualisasi tidak sesuai dengan realita yang ada maka dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Utara tidak memaksimalkan kinerja sumber daya yang mereka miliki. Kebijakan dapat terhindar dari kebobrokan jika koordinasi dapat berjalan secara terorganisir, sehingga kepastian yang berasal dari kebijakan tersebut akan tepat sasaran sesuai harapan. Selain itu dibutuhkan pula beberapa tahap mulai dari perencanaan, pemilihan media, aktualisasi hingga evaluasi segala tahapan kebijakan yang telah disepakati secara bersama.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terus berupaya menghadirkan kebijakan-kebijakan yang dapat berguna untuk para korban bencana. Dimana tingkat kebutuhan dalam pemulihan sosial ekonomi pasca bencana dapat diamati melalui FGD (*Forum Group Discussion*) dengan melibatkan Bupati, Skpd, Bpbd, Camat, Lurah, Tokoh Masyarakat dan para korban, yang kiranya dapat menjadi tempat aspirasi masyarakat dalam bertahan hidup pasca bencana. Sehingga dari FGD tersebut pemerintah Kabupaten Luwu Utara lebih mudah untuk membuat suatu kebijakan yang inovatif searah dengan kebutuhan masyarakat korban bencana.

Isi Penutup/simpulan dan saran wajib ada, ditulis dengan judul terpisah dari isi pembahasan. Saran dapat berisi himbauan dari penulis untuk peneliti selanjutnya atau saran agar hasil penelitian ini digunakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asy’ari, Q. (2018). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor dan Kekeringan di Pamekasan 2007). *J-Macc*, *1*(2), 153–168.

bnpb.go.id. (2020). *Tantangan dan Kendala yang Dihadapi*. Bnpb.Go.Id. https://bnpb.go.id/berita/Giat Pembersihan Jalan Pascabanjir Bandang Luwu Utara, Tantangan dan Kendala yang Dihadapi

Budi, S. (2011). *Komunikasi Bencana* (A. Ishak, Aswad; Junaedi, Fajar; Budi, Setio; Prbowo (ed.); Pertama). Buku Litera; BPC Yogyakarta, ASPIKOM.

Bungin, B. (2014). *Sosiologi Komunikasi*. Prenada Media Group.

Cangara, H. (2016). *pengantar ilmu komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada.

Creswell, J. W. (2014). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)* (KE EMPAT). PUSTAKA PELAJAR.

Hukum Online.com. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *April*. https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b2885a7bc5ad/node/1060/undangundang-nomor-32-tahun-2009

Johnson, C. A. (2007). Social capital and the search for information: Examining the role of social capital in information seeking behavior in Mongolia. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, *58*(6), 883–894. https://doi.org/10.1002/asi.20561

Kementerian, A. I. (2006). *Al-Qur’an dan terjemahan*. CV. Penerbit Diponegoro.

Kusumasari, B. (2014). *Manajemen bencana dan kapabilitas Pemerintah Lokal*. Gava Media.

Lestari, P. (2011). *Komunikasi Bencana* (A. Ishak, Aswad; Junaedi, Fajar; Budi, Setio; Prabowo (ed.); Cetakan Pe). Buku Litera; BPC Yogyakarta, ASPIKOM.

Littlejhon, Stephen W; Foss, K. A. (2009). *Teori Komunikasi (Theories of Human Communication)* (9th ed.). Salemba Humanika.

Muktaf, Z. M. (2017). Studi Literasi Bencana dalam Perspektif Ilmu Komunikasi. *Apik Ptm*, 1–12. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/14605/Studi Literasi Bencana dalam Perspektif Komunikasi repository.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Parsons, W. (2006). *Public Policy (Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan)* (T. B. Wibowo (ed.); Cetakan Ke). Kencana.

Rijanta, R; Hizbaron, D.R; Baiquni, M. (2018). *Modal Sosial Dalam Manajemen Bencana*. Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Yin, R. (2012). *Studi Kasus Design & Metode* (D. Mudzakir (ed.); Revisi). PT Raja Grafindo Persada